

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Secara umum, akuntansi merupakan bahasa bisnis, karena akuntansi dijadikan alat komunikasi oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas berbisnis.

Berikut ini pengertian akuntansi menurut para ahli:

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2016:2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting consist of three basic activities – it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recordings consist of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Dwi Martani (2012:4), pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu:

- “1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber:

Menurut Kasmir (2014:7), definisi laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Bambang Riyanto (2012:327), definisi laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan *Finansiil (Financial Statement)*, memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansil* suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun”.

Jadi, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Sedangkan Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.

2.1.1.5 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.

2. Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.

3. Dapat dipercaya

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan

keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

2.1.1.6 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.1.1.7 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:10) akuntansi pajak dijelaskan sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35) akuntansi definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk

mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.8 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11)

sebagai berikut :

- “1. Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan.

Menurut Sartono (2012:122), definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Irham Fahmi (2015:135) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”

Sedangkan Menurut Kasmir (2015:196) definisi rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya pengguna rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuangan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, dan jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan tersebut.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197) adalah:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Sementara itu manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Perhitungan rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan dan untuk mengukur semua yang berhubungan dengan laba seperti mengukur besarnya laba bersih maupun laba kotor serta mengukur margin laba dll.

Menurut Kasmir (2015:199) dalam praktiknya terdapat beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin adalah Laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Menurut Kasmir (2015:199) *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah Ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Menurut Kasmir (2015:200) *Net Profit Margin* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Investment*

Hasil Pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment (ROI)* atau *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Perhitungan *Return On Investment* menurut Kasmir (2015:201) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$$

4. *Return On Equity*

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Menurut Kasmir (2015:204)

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Stakeholder's Equity}}$$

Sedangkan menurut R. Agus Sartono (2012:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

“1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rumus perhitungan *GPM* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Gross profit margin merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan bebanbeban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka

semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROA* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

5. *Return On Equity (ROE)*”.

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return On Equity* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas di atas, maka penulis memilih *Return On Investment/Return On Assets* untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan terindikasi melakukan pengindaran pajak atau tidak, karena ROI dapat menggambarkan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan dananya. Semakin tinggi nilai ROI, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula. Nilai ROI mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROI berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki

kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Tommy, 2013).

2.1.5 Likuiditas

2.1.5.1 Definisi Likuiditas

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Menurut Irham Fahmi (2015:65) pengertian likuiditas adalah:

“Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.”

Pengertian Likuiditas menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) adalah:

“Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya.”

Menurut Kasmir (2015:130) pengertian rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)”.

Sedangkan menurut Sofyan Harahap (2011:301) pengertian Rasio Likuiditas adalah:

“Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihubungkan melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas dipandang sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Penghitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut Kasmir (2015:132) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya”.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2015:134) jenis-jenis rasio yang ada dalam Rasio Likuiditas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam praktiknya, rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Perhitungan *Current Ratio* menurut Kasmir (2015:134) adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)

Quick Ratio adalah Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Perhitungan *Quick Ratio* atau *Acid Test* menurut Kasmir (2015:135) adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Perhitungan *Cash Ratio* menurut Kasmir (2015:138) adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Sedangkan menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:75), rasio-rasio yang digunakan dalam rasio likuiditas ini ada dua, di antaranya adalah:

1. Rasio lancar (*current ratio*)

“Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). Rasio Lancar merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar”.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. Rasio Cepat (*quick ratio/acid test ratio*)

“Rasio cepat (*quick ratio*) yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancarnya. Dalam rasio ini jumlah persediaan (*inventory*) sebagai salah satu komponen dari aktiva lancar harus dikeluarkan, dikarenakan persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling tidak likuid, sementara dengan *quick ratio* dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar.”

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Dari beberapa jenis rasio likuiditas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dalam mengukur rasio likuiditas. Karena rasio lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dengan jumlah uang likuid yang tersedia dalam perusahaan, baik untuk operasional maupun untuk membayar hutang jangka pendek.

2.1.6 *Leverage*

2.1.6.1 *Definisi Leverage*

Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan

penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan.

Menurut Agus Sartono (2012:121) *leverage* merupakan:

”*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.”

Menurut Kasmir (2015:151) definisi rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi).”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:127) definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut di likuidasi.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penghitungan Rasio *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio* diantaranya adalah:

- "1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (Kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya”.

Adapun manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2015:153) diantaranya adalah sebagai berikut:

- "1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih.ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan manfaat lainnya”.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Menurut Agus Sartono (2012:121) pengertian *Debt ratio* adalah sebagai berikut:

“*Debt Ratio* menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva”.

Menurut Kasmir (2015:156) pengertian *debt ratio* adalah:

“*Debt ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”. Rumus untuk menghitung *Debt Ratio* adalah:

$$Debt Ratio = \frac{Total Utang}{Total Aktiva}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2015:158) *Debt to Equity Ratio* merupakan:

”Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.” Rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal (Equity)}}$$

3. *Time Interst Earned Ratio*

Agus Sartono (2012:121), mendefinisikan *Time Interst Earned Ratio* adalah:

“Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga”. Rumus untuk menghitung *Time Interst Earned Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Time Interst Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Agus Sartono (2102:122) mendefinisikan *Fixed Charge Coverage Ratio* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termask pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu”. Rumus untuk menghitung *Fixed Charge Coverage Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Beban Bunga}}$$

5. *Debt Service Coverage*

Agus Sartono (2012:122), mendefinisikan *Debt Service Coverage* adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama seperti *leverage* yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.”

Rumus untuk menghitung *Debt Service Coverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - \text{Tarif Pajak})}}$$

Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas menurut

Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:79), sebagai berikut:

1. Debt to Total Assets Ratio (Debt ratio)

“Total Debt to Total Assets Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva”. Secara sistematis dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

2. Debt to Equity Ratio

“*Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya”. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equiti Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (Equity)}}$$

3. Time Interst Earned Ratio

“*Time Interest Earned Ratio* (TIE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Secara implisit rasio ini menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga”.

$$\text{Time Interst Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. Fixed Charge Coverage Ratio

“*Fix Charge Coverage* merupakan rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa.”

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Beban Tetap Total}}$$

Bunga+Pembayaran Sewa

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* untuk menghitung *leverage*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan.

2.1.7 *Tax Avoidance*

2.1.7.1 Definisi Pajak

Definisi pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu:

- "1. Fungsi *budgeter* (sumber keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan lain-lain
2. Fungsi *regulered* (pengatur)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

2.1.7.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2013:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPn, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan BM
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.7.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan tarutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.7.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak

bagi perusahaan merupakan pengurang laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah faktor pengurang laba (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2013:13) Manajemen Perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efektif dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara ilegal yaitu:

1. Penghematan Pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan Pembayaran Pajak
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan
5. menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).

2.1.7.7 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) pengertian *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Sedangkan Menurut Pohan (2016:23) pengertian *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

"1. Menahan diri

Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak

- menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut.
2. Pindah lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
 3. Penghindaran pajak secara yuridis
Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

2.1.7.8 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
------------	-----------------	------------

GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S. CTE} - \text{fgn CTE}) / \text{U.S. STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} + m_i$	A measure of unexplained total book-tax difference
Unrecognized tax benefefits	Disclosed amount post-FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010), variabel *tax avoidance* dihitung melalui *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Net\ Income\ Before\ Tax}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus *CETR* ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan dan *CETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono	2012	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Likuiditas dan Komisaris Independen berpengaruh negatif sementara Leverage dan Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
2	Kurniasih dan Sari	2013	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>ROA</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha	2014	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Alit Ketut	2014	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> dan

	Suardana		Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Chandra	2015	Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Financial Leverage</i> , Likuiditas, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas dan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , dan Likuiditas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Nirmala Sari	2016	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Komisaris Independen dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setawan	2016	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Dina Marfiah dan Fazli Syam BZ	2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> , Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Rezka Olva	2018	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa

			Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Shinta Budianti dan Khristina Curry	2018	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Pohan (2013:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penelitian ini menguji pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan penghitungan *cash effective tax rate* (CETR). Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Dari pemaparan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Dewinta dan Setiawan (2016) juga menyatakan bahwa Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajaknya.

Menurut Darmadi (2013) perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) juga menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak.

2) Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Subramanyam dan Wild (2010:241) dalam Irvan dan Henryanto (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (Suyanto, 2012).

Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari, Andi (2016) dan Chandra (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3) Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila

perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Menurut Nurfadilah (2014) perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Putu (2016) Calvin dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2013), Dewinta dan Setiawan (2016), Permata dan Nurlaela (2018), dan Saidah (2018) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan

dalam melakukan pembiayaan di perusahaannya. perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun ada undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan memperoleh insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman (Saidah, 2018).

4) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Chen dan Yuan *et al.* (2009) dalam Pratiwi (2017) menyatakan bahwa:

“The ratio of financial statements can be seen as an indicator of tax expense.”

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari, 2013).

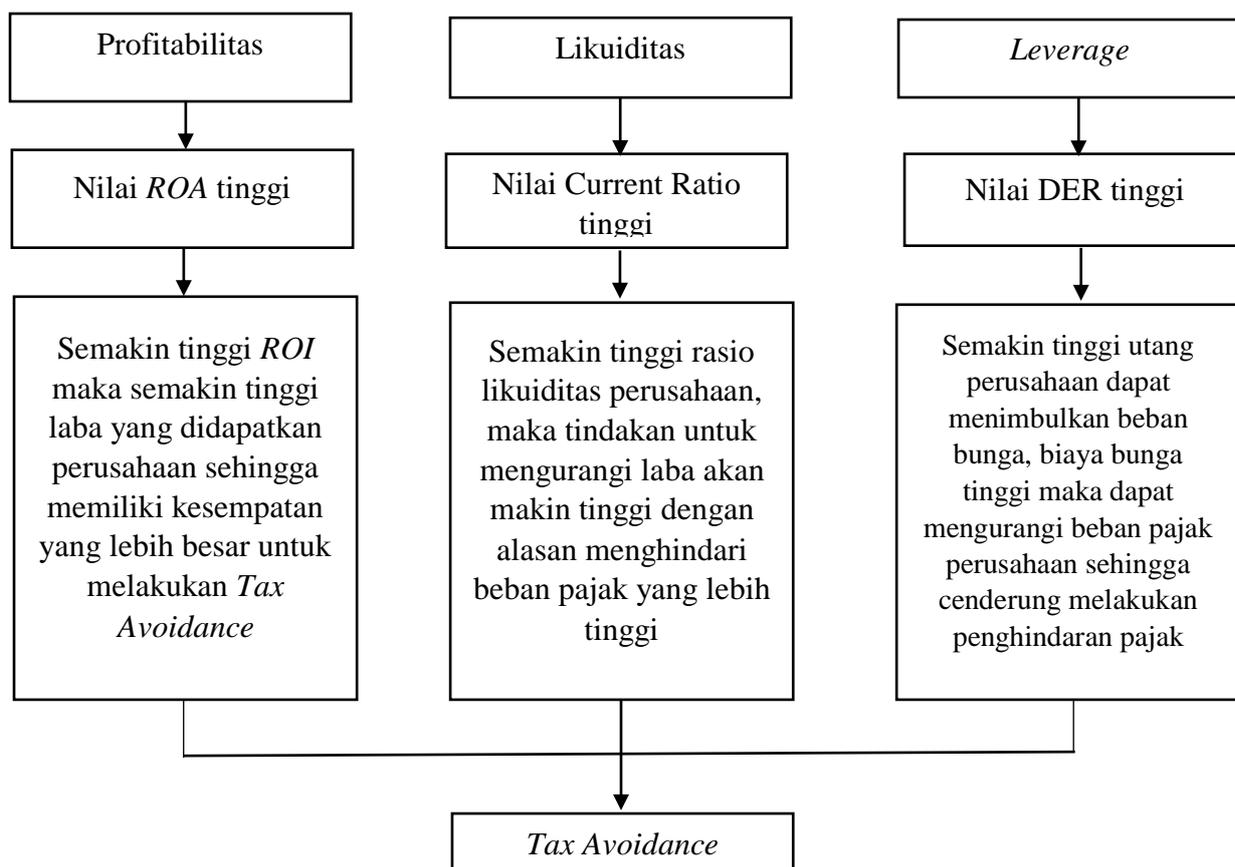
Selain Profitabilitas, Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi

dengan alasan menghindari beban pajak yang lebih tinggi (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Selain Profitabilitas dan Likuiditas, *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Menurut Suyanto (2012) Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*Fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Nurfadilah, 2014).

Hubungan profitabilitas likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu merupakan rasio keuangan apabila nilai Profitabilitas tinggi, nilai Likuiditas tinggi dan nilai *Leverage* tinggi dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

H₂ : Terdapat Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ : Terdapat Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*.

H₄ : Terdapat Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*.